

Implementasi Resep Pembangunan Internasional *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata di Desa Wisata Bugisan

The Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) As an International Recipe in The Development of Equal Village Economic Growth in Bugisan Tourism Village

Tanti Nurgiyanti^{1*}, Dian Resha Rahmayanti², Harits Dwi Wiratma³, Tri Septa Nurhantoro⁴,
Ariel Nethan⁵

^{1, 3, 5}Prodi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta

²Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Respati Yogyakarta

⁴Prodi Sastra Inggris, Universitas Respati Yogyakarta

^{1*}tanti.nurgiyanti@respati.ac.id, ²dianrhesa@respati.ac.id, ³h_rits@respati.ac.id,

⁴trisepta@respati.ac.id, ⁵19320030@respati.ac.id

*penulis korespondensi

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang implementasi resep pembangunan internasional SDGs dalam pertumbuhan ekonomi desa merata di Desa Wisata Bugisan. Konsep SDGs merupakan resep pembangunan internasional yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara negara maju dan berkembang. SDGs merupakan program lanjutan yang disepakati dan akan diterapkan bagi negara-negara yang memiliki 17 aspek serta target penyelesaian di tahun 2030. Sebagai negara berkembang Indonesia juga menerapkan agenda pembangunan tersebut. Untuk mencapainya digunakan tahapan dengan menggunakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 agar unit terkecil administrasi negara, yaitu Desa dapat mengimplementasikan SDGs. Mengingat terdapat 17 tujuan dalam SDGs pada penelitian ini kami membatasi pada SDGs poin 8 (pertumbuhan ekonomi desa merata). Upaya yang dilakukan desa dalam mencapai poin ke 8 tersebut dengan membentuk Desa Wisata. Keberadaan desa wisata juga erat kaitannya dengan konsep CBT karena dukungan masyarakat berupa penyediaan program wisata, pembangunan infrastruktur secara swadaya, dan kewirausahaan yang dijalankan menjadi penciri pada konsep tersebut. Peneliti mengambil studi kasus di Desa Wisata Bugisan sebagai lokasi penelitian.

Kata kunci : *SDGs*; pertumbuhan ekonomi desa merata; Desa Wisata Bugisan; *community-based tourism*

Abstract

This paper will discuss the implementation of SDGs as an international recipe for the development of equal village economic growth in Bugisan Tourism Village. The concept of SDGs is an international development recipe agreed upon by countries in the world to overcome development disparities between developed and developing countries. SDGs is an agreed follow-up program and will be implemented for countries that have 17 aspects and a target for completion in 2030. As a developing country, Indonesia has also implemented this development agenda. To achieve this some steps are taken based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 13 of 2020 that the smallest unit of state administration, namely the village, can implement the SDGs. Considering the goals in the SDGs, this study is limited to SDGs point 8 (equal village economic growth). The efforts carried out by the village to reach point

8 are by developing a tourism village. The existence of a tourist village is also closely related to the CBT concept; because community support in the form of providing tourism programs, self-subsistent infrastructure development, and entrepreneurship as running features of this concept. The researcher took a case study in Bugisan Tourism Village as the research location.

Keywords: SDGs; equal village economic growth; Bugisan Tourism Village; community-based tourism

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada umumnya dikenal sebagai sebuah tindakan menuju perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Perubahan diartikan sebagai sebuah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building) (1). Pembangunan dikenal luas pada era 1970-an, di mana pada era ini banyak negara Dunia Ketiga yang berhadapan dengan permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, ide mengenai pembangunan kemudian muncul menjadi salah satu alternatif yang dianggap dapat mengatasi permasalahan tersebut (2).

Pada tahun 2000, para pemimpin dunia menyepakati tentang 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur yang disebut Millenium Development Goals (MDGs). Pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs(3).

Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai SDGs dilakukan melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.(4) Melalui Peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh pemerataan pembangunan, sehingga gap pembangunan yg terjadi antara Indonesia bagian Barat dan Timur dapat tereduksi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, pengertian SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan,

Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada pasal 6 penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional salah satunya untuk mencapai SDGs desa yaitu pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.

Desa Bugisan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Bugisan dirintis sejak tahun 2015. Desa ini berlokasi di antara Candi Prambanan dan Candi Plaosan. Pada Maret 2022 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Klaten menyelenggarakan lomba desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Kegiatan ini berlangsung pada 7 – 8 Maret 2020 dan diikuti oleh 17 perwakilan desa wisata di Kabupaten Klaten. Dalam kesempatan ini Desa Wisata Bugisan berhasil meraih Juara 1 kategori desa wisata serta merebut Juara 2 untuk kategori Pokdarwis. (5)

Menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dengan bentuk desa wisata di Bugisan, sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata khususnya pengembangan potensi local untuk pemerataan ekonomi di tingkat administrasi negara yang paling kecil yaitu Desa. Selain itu keberadaan desa wisata yang masih tetap eksis dari tahun 2015 hingga saat ini juga melibatkan adanya Pokdarwis yang telah berhasil meraih Juara 2 dalam lomba desa wisata tersebut. Hal ini menjadi relevan jika dipaparkan melalui konsep Community Based Tourism (CBT). Konsep CBT merupakan bentuk pembangunan pariwisata yang difokuskan pada pelibatan penduduk lokal dan ditujukan untuk kesejahteraan mereka. Penduduk lokal memiliki kendali penuh atas pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata, sebagian besar pendapatan ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan alam dan tradisi penduduk setempat. Bentuk pengembangan pariwisata ini seringkali dipadukan dengan pengembangan kegiatan produksi, seperti transformasi hasil pertanian atau workshop kerajinan, yang produknya terutama dijual kepada wisatawan (6). Dengan demikian keberadaan desa wisata dengan kondisi tersebut sangat erat dengan pemberdayaan dan kewirausahaan yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah: Bagaimana implementasi SDGs dalam Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata di Desa Wisata Bugisan? Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka setidaknya ada dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fasilitas/jasa wisata yang diusahakan oleh komunitas masyarakat desa setempat. Mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana implementasi SDGs point 8 (pertumbuhan ekonomi desa merata) di tingkat Desa sebagai unit administrasi negara yang terkecil.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan hasil riset dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Robert K. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Serta peneliti memiliki sedikit kontrol atas fenomena dan konteks yang ada.(7).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SDGs Desa di Indonesia telah diterapkan dan berjalan sejak 2021. Pembangunan desa amat penting mengingat 188 juta warga desa merupakan 43% dari penduduk Indonesia. Keberhasilan penerapan SDGs Desa secara otomatis akan mendorong keberhasilan pencapaian SDGs Nasional. Praktik baik implementasi Tujuan Pembangunan Desa Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa membutuhkan inisiatif, inovasi, kreativitas, dan kepeloporan dengan model berpikir yang tidak biasa atau out of the box (8).

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut(9):

Tabel 1. Tipologi Desa dan Tujuan SDGs Desa

Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (I)	Desa ekonomi tumbuh merata (II)	Desa peduli kesehatan (III)	Desa peduli lingkungan (IV)
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;	SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;	SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan	SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan	SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;	SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
	SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan	SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman	SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
	SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan		SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
Desa peduli pendidikan (V)	Desa ramah perempuan (VI)	Desa berjejaring (VII)	Desa tanggap budaya (VIII)
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas	SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa	SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa	SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan
			SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Menurut website SDGs Desa, Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya

padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.(10)

Tabel berikut merupakan data yang diperoleh peneliti terkait SDGs Desa ke 8 di Desa Bugisan:

Tabel 2. Data Hasil Penelitian

No.	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	22	102	Jiwa
8.3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	5.26	2	RT
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	78.97	242	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	0	0	Jiwa

Data yang diperoleh seluruh capaian SDGs Desa ke 8 sebesar 26,56 %. Menurut Rudi Riono selaku Bayan, data yang diperoleh belum mencapai 100% karena beberapa hal, baik itu menyangkut aspek teknis dan non teknis. Dinamika pengisian data SDGs dimulai dari tahap awal aplikasi SDGs yang diunduh di *playstore* setelah digunakan terdapat banyak *double data* (data ganda). Selain itu survey yang dilakukan oleh unit independen di luar perangkat desa juga menemui banyak kesulitan, diantaranya ketidakjujuran responden (baik data jumlah penghasilan maupun asset pribadi yang dimiliki), surveyor dicurigai akan menyebarkan data pribadi (misal nomer handphone dan juga data dalam kartu keluarga).

Proses input data yang dilakukan enumerator juga memiliki kendala teknis, aplikasi SDGs hanya dapat dibuka tanpa hambatan pada pukul 24.00 yang bukan merupakan jam kerja, selain itu kendala jaringan internet yang terdapat di wilayah masing-masing desa.

Desa juga memiliki beban kerja yang tinggi karena harus mengerjakan beberapa aplikasi diantaranya SDGs, EHDW, SIMPERIUM, SISKEUDES, SAKURA, SIPADES, PAKBEJO, DAYADESAKU, SIPITUNG, SIMADE, ASMARA, dll yang ditotal lebih dari 20 aplikasi, sehingga juga berpengaruh terhadap jumlah sumber daya manusia yang ada di Kelurahan. Hal ini peneliti peroleh dari wawancara yang dilakukan kepada Carik (Sekdes) Desa Bugisan Bapak Dwijo Pitoyo.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Pelaksanaan program SDGs Desa Bugisan masih pada tahap proses input data. Hal ini dipengaruhi oleh sosialisasi SDGs baik pada perangkat desa maupun masyarakat desa secara umum tidak merata. Akses informasi masih sangat terbatas dan anggapan negative dari masyarakat pribadi terkait survai yang dilakukan untuk kebutuhan input data membuktikan melek informasi mengenai SDGs sangat rendah.

Penelitian ini juga menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT) yang merupakan pendekatan pembangunan pariwisata dengan penekanan kepada pengelolaan masyarakat lokal baik secara manajerial maupun pembagian keuntungan. Konsep ini diimplementasikan melalui terbentuknya Pokdarwis Candi Kembar pada tahun 2016 yang beranggotakan sejumlah stakeholder pariwisata yang tersebar di 5 wilayah Desa Bugisan yaitu Dukuh, Purwodadi, Dukuh Bener, Dukuh Cepoko, Dukuh Bugisan dan Dukuh Plaosan. Keanggotaan tersebut bersifat sukarela sesuai dari

Surat Keputusan dari Desa. Pokdarwis Candi Kembar memiliki struktur organisasi dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta 7 seksi-seksi yaitu : Sarana Prasarana, Lingkungan Hidup, Marketing, Kesenian, Publikasi dan Promosi, Guiding serta Kuliner.

Dalam melakukan program kerjanya, Pokdarwis Candi Kembar memiliki dana yang bersumber dari beberapa pihak, antara lain yaitu : swadaya anggota, aset Pokdarwis, pemerintahan desa, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi, serta para donatur yang tidak bersifat mengikat.(11)

Menurut Rudi Riono selaku ketua Pokdarwis fasilitas serta bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat sekitar dalam eksistensi Desa Wisata Bugisan disebutkan terdapat kelompok kerja yang terdiri dari masyarakat Desa Bugisan dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang Kerajinan (seni ukir batu menjadi miniatur candi, mainan dari kayu, alat pijat dari kayu, dan *eco-print*), Seni Budaya (kesenian Pring Sedapur yaitu kelompok kesenian yang memainkan alat musik dari bambu, Karawitan, Tari Kolosal, dan Gejoglesung), Prasarana (pengelolaan sampah), Tour Guide (kekurangan SOP terkait tata cara memandu wisatawan agar memberi kesan yang menarik dan tidak membosankan), dan Seksi Keamanan. Bentuk keterlibatan masyarakat desa Bugisan terhadap desa Wisata adalah dengan menjaga kebersihan di sekitar desa wisata, menjaga keramah tamahan kepada wisatawan dan memberi kesan yang baik kepada wisatawan agar mau berkunjung kembali ke desa wisata Bugisan.

Pasca didirikan Pokdarwis Candi Kembar dan kelompok kerjanya menikmati hasil dari keberadaan berbagai usaha yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata local. Jumlah penghasilan dari penjualan UKM, peningkatan jenis usaha UKM yang berpusat di Paseban, penjualan tiket untuk seksi Seni dan Budaya meningkat. Omzet penjualan dapat digunakan untuk kas Desa, membayar fasilitas listrik dan air, pemasukan bagi BUMDES. Sehingga ikut menciptakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat Desa Bugisan. Fasilitas Home Stay juga turut bertambah disebabkan jumlah kunjungan wisatawan domestic, berbagai jenis komunitas tertarik untuk mengadakan event di Desa Bugisan. Namun pada tahun 2019-2021 masa covid-19 terjadi penurunan cukup tajam terhadap kunjungan wisatawan yang berakibat pada jumlah penghasilan yang diperoleh Pokdarwis selaku pengelola Desa Wisata Bugisan berangsur mengalami penurunan. Penghasilan yang diperoleh saat ini terkadang hanya cukup untuk biaya operasional keberadaan Paseban sebagai pusat kuliner, bahkan apabila biaya operasional tidak mampu dibayar maka hal ini akan menjadi tanggungjawab pemerintah Desa Bugisan yang berujung pada pengeluaran dana Kas Desa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi SDGs dalam Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata di Desa Wisata Bugisan belum maksimal, hal ini dikarenakan banyak factor internal dalam pelaksanaannya. Terbukti dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan besaran minimal dari angka ketercapaian 100%. Selain faktor-faktor internal dalam masyarakat, ketidaktercapaian Implementasi SDGs ini juga disebabkan oleh factor kelemahan system aplikasi yang membuat proses input data menjadi terganggu. Terlebih lagi beban kerja perangkat desa yang terlalu banyak dalam menyelesaikan beberapa program berbasis aplikasi.

Kesimpulan di atas, memberikan penjelasan baru terkait permasalahan yang harus segera diatasi. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan diantaranya; bagi pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi seluruh program SDGs kepada masyarakat. Melakukan pendampingan terhadap SKPD maupun enumerator yang bertugas melakukan input maupun survey terhadap responden agar mampu melakukan tugas dengan maksimal, membaca data, tujuan dan hasil SDGs. Apabila input data dalam aplikasi SDGs dapat berjalan maksimal maka

akan menghasilkan contoh program yang di rekomendasikan yang bertujuan memaksimalkan pembangunan desa. Sehingga, akhirnya kekuatan masyarakat untuk bangkit kembali pasca pandemi ini bisa di wujudkan dan realisasikan. Dan target 2024 penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Siagan SP. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara; 2000.
- (2) Winarno B. Isu-isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS; 2011.
- (3) Pembangunan B. Kementrian PPN/Bappenas [Internet]. Kementrian PPN/Bappenas. 2012. Available from: <https://www.bappenas.go.id/id/berita/konsep-sdgs-kerangka-pembangunan-pasca-2015>
- (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 [Internet]. JDIH BPK RI. 2020. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020>
- (5) Kominfo. Angkat Wisata Budaya, Desa Bugisan Akan Bawa Nama Klaten di Kancuh Provinsi [Internet]. Website Pemkab Klaten. 2020. Available from: <https://klatenkab.go.id/angkat-wisata-budaya-desa-bugisan-akan-bawa-nama-klaten-di-kancah-provinsi/>
- (6) Hidayah N. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Sejarah, Definisi, Prinsip, Dll [Internet]. Nurdin Hidayah. 2021. Available from: <https://pemasaranpariwisata.com/2021/05/05/pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-sejarah-definisi-prinsip-bentuknya/>
- (7) Yin RK. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Press; 2015.
- (8) Pos.com ES. Praktik Baik SDGs Desa Butuh Inovasi dan Kreativitas [Internet]. Head Topics Indonesia. 2022. Available from: <https://headtopics.com/id/praktik-baik-sdgs-desa-butuh-inovasi-dan-kreativitas-27742222>
- (9) Ar-Rahman. Apa itu SDGs Desa dan 18 Tujuannya. Berbagidesa.com [Internet]. 2020; Available from: <https://www.berbagidesa.com/2020/12/sdgs-desa-dan-18-tujuannya.html>
- (10) SDGs Desa [Internet]. SDGs Desa Kemendes. Available from: <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-desa-nomor-8-pertumbuhan-ekonomi-desa-merata/>
- (11) Aulia06. Pokdarwis Candi Kembar [Internet]. issue. 2020. Available from: https://issuu.com/aulia06/docs/pokdarwis_candi_kembar